

KONSEPSI *TRUST* YANG DIBANGUN ETNIS TIONGHOA DALAM POLITIK DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Eki Darmawan., M.IP

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang

ekidarmawan75@yahoo.co.id

ABSTRACT

*Trust is an expectation that a person can be trusted in all relationships, demonstrate consistent and predictable behavior. Trust owned predictions related to gains and losses will result because these choices. Presentation concept of trust is very important to understand the issues of transparency and accountability networking interaction of the actors in governance. Some have argued the importance of trust in governane networking. **First**, in setting the theory of governance, the concept of trust into one keywords in it. **Second**, network governance as key words to make the trust as the foundation of the building. **Third**, the principle of transparency and accountability of governance actors is strongly associated with the concept of trust, where trust becomes the purpose of the implementation of these two principles. Various opinions of scientists put trust as the foundation, pillars and social capital in networking and building effective governance, so it is important to understand the concept of trust in the context of network and governance. Confidence (trust) is the basic element of relations between the actors and the social structure of the network, so the trust manifested in the form of building the network. Social capital makes the trust as an integral part even be the main pillars of social network system. The socialist social system built with the advent integrity of a particular ethnic, one of them ethnic Chinese in Kepulauan Riau, Especially Tanjungpinang. It was built in Tanjungpinang are ethnic Chinese with identity politics and ethnic politics they controlled sectors of the economy, education, culture, and religion is so strong that formed Hight-Trust. **Keywords: Trust, Chinese Ethnicity, and Identity Politics***

ABSTRAK

Trust merupakan suatu harapan bahwa seseorang dapat dipercaya dalam segala hubungan, menunjukkan perilaku konsisten dan dapat diprediksi. Trust yang dimiliki berhubungan dengan prediksi keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh karena pilihannya tersebut. Penyajian konsep trust menjadi sangat penting untuk memahami persoalan transparansi dan akuntabilitas

interaksi networking aktor-aktor didalam governance. Ada beberapa argumentasi pentingnya trust didalam governane networking. **Pertama**, dalam setting teori governance, konsep trust menjadi salah satu kata kunci didalamnya. **Kedua**, network sebagai kata kunci governance menjadikan trust sebagai fondasi bangunannya. **Ketiga**, prinsip transparansi dan akuntabilitas aktor-aktor governance sangat terkait dengan konsep trust, dimana trust menjadi tujuan dari pelaksanaan kedua prinsip tersebut. Berbagai pendapat ilmuwan menempatkan trust sebagai fondasi, pilar dan modal sosial di dalam membangun networking dan governance yang efektif, sehingga sangat penting memahami konsep trust ini dalam konteks network dan governance. Kepercayaan (trust) merupakan elemen dasar relasi antar aktor dan juga struktur sosial jaringan, sehingga wujud trust termanifestasikan dalam bangunan network. Modal sosial menjadikan trust sebagai bagian yang tak terpisahkan bahkan menjadi pilar pokok network sistem sosial kemasyarakatan. Sistem soaial kemasyarakatan tersebut di bangun dengan munculnya integritas dari etnis tertentu, salah satunya etnis Tionghoa di Kepulauan Riau, Khususnya Kota Tanjungpinang. Hal yang dibangun etnis Tionghoa di Tanjungpinang adalah dengan politik identitas dan politik etnik mereka menguasai sektor ekonomi,sektor pendidikan, budaya, dan agama yang sangat kuat sehingga membentuk Hight-Trust.

Kata Kunci: Trust, Etnis Tionghoa, dan Politik Identitas

PENDAHULUAN

Perjalanan Masuknya Etnis tionghoa ke Indonesia sampai diterimanya masyarakat Tionghoa sebagai bangsa Indonesia amatlah panjang dari zaman Pemerintahan Kerajaan dan Zaman Kolonial.Untuk lebih mudahnya lagi melihat masuknya Etnis tionghua ke Indonesia adalah pada saat perdagangan bebas yang diterapkan Pemerintahan Hindia-Belanda.Dalam buku Iskandar Jusuf tentang Tionghoa menceritakan masuknya Etnis Tionghoa mulai dari Batavia atau Sunda Kelapa atau sekarang disebut sebagai Kota Jakarta. VOC membutuhkan orang-orang tionghoa untuk membangun kota Batavia di atas puing-puing kota pelabuhan Jayakarta. Pada saat itu orang tionghua sudah banyak bermukiman di kota-kota pesisir Nusantara. Kota pesisir Jawa yang jaraknya paling dekat dengan Batavia misalnya banten.(Jusuf,2012:8).

Pengaruh orang tionghoa sangat penting dalam mengembangkan sektor ekonomi di Nusantara apalagi dengan dekatnya keterkaitan antara orang tionghoa dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Hal ini membuat ketakutan pemerintahan Hindia-Belanda akan tersaingi dalam perdagangan dan pemanfaatan Sumber daya yang ada di Indonesia, sehingga di bentuklah politik etis dan pembagian Golongan antar masyarakat berdasarkan etnis tersebut menjadi tiga yakni Golongan Eropa, Golongan timur Asing yang terdiri dari pendatang seperti orang Tionghoa, orang Arab dan orang Asia lainnya, serta golongan Bumi putra yakni orang asli Indonesia. Disinilah dilakukan pembedaan baik dari segi aturan, atau pendidikan dan perlakuan, bahkan dikotak-kotakkan berdasarkan wilayah bermukiman, sehingga masih banyak peninggalan di Indonesia nama-nama tempat yang dinamakan kampung Cina.

Pembagian berdasarkan tiga golongan tersebut ditilik dari sejarah, praktik diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia beawal pada masa pemerintahan Hindia-Belanda yang mengeluarkan ketentuan pasal 163 *Indische Staatsregelling Wet van 2 September 1854*, Ned.S.1854-2,S.1855-2 jo.1, yang membagi penduduk Hindia-Belanda menjadi 3 (tiga) golongan penduduk, yakni : (1) Golongan Eropa, (2) Golongan Golongan Timur Asing, (3) Golongan Pribumi (Winarta, 2007).

Hal ini dilakukan pemerintah Hindia-Belanda yang di sebut dengan politik *divide at impera* yakni mengkotak-kotakan masyarakat Hindia-Belanda berdasarkan etnis dan agama. Pada Orde baru ini juga di praktekkan secara tidak langsung oleh pemerintahan Indonesia sehingga terjadi diskriminasi.Perbedaan itu muncul misalnya seperti antara jawa dan non-jawa, Muslim dan Non-Muslim, Militer dan Sipil, Mayoritas dan Minoritas serta Pribumi dan non-Pribumi.Rezim Orde baru telah menggunakan Hukum

sebagai alat untuk mendiskriminasi etnis tionghoa di Indonesia. Secara sistematis dan konsisten, rezim orde baru telah membatasi, menekan dan menghancurkan hak-hak politik etnis tionghoa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang sangat mengucilkan etnis tionghoa di Indonesia menjadi *a politics* sehingga tidak ada lagi representasi efektif etnis Tionghoa di pemerintahan maupun di badan legislatif pada waktu itu. Peluang bisnis justru diberikan kepada sekelompok kecil saja etnis Tionghoa sehingga tercipta golongan konglomerat dari Etnis Tionghoa yang dianggap sebagai golongan oportunis, hanya memperkaya dirinya tanpa memperdulikan nasib masyarakat di sekitarnya, sehingga timbul anggapan *stereotype* sebagaimana dideskripsikan kaum kolonial bahwa etnis tionghoa telah menyebabkan kemiskinan.

Setelah kemerdekaan sampai Reformasi pun terjadi dan penggulingan rezim orde baru telah membuat etnis tionghoa di Indonesia seakan mendapatkan angin segar. Meskipun demikian tetap saja masih ada ketakutan tersendiri bagi etnis Tionghoa untuk mencampuri urusan Politik, dikarenakan yang terjadi saat Mei 1998 dimana Etnis Tionghoa juga menjadi sasaran kerusuhan, seakan pemerintah yang membiarkan dan gerakan kelompok kepentingan lain selain menjatuhkan Rezim yang membuat hal ini terjadi kemudian masih menjadi tanda tanya apakah ini motif dari pemerintah untuk pembersihan etnis, masyarakat Etnis Tionghoa banyak yang barangnya dijarah dan diperkosa saat itu. Hal ini patut dibahs karena menyangkut identitas Bangsa Indonesia yang Multikulturalisme. Secara Psikologis menimbulkan rasa takut dan enggan sebagian besar etnis Tionghoa untuk berpolitik, akan tetapi Politik Etnik mulai muncul untuk mempertahankan etnisnya dalam mempertahankan identitas social di Indonesia. Setelah etnis Tionghoa memasuki wilayah politik yang dulunya bentuk partisipasi etnis Tionghoa pada saat itu hanya memiliki hak memilih dan tidak berhak untuk dipilih, kemudian Pada tanggal 16

september 1998 presiden BJ Habibie mengeluarkan inpres No.26/1998 yang isinya menghapus istilah masyarakat pribumi dan masyarakat non pribumi, sehingga ada kesetaraan antara etnis Tionghoa dan Pribumi mulai saat itu. (Pratama, 2014:3)

Era reformasi membawa perubahan demokratisasi yang begitu cepat pada perpolitikan di tanah air. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat etnis Tionghoa, Pada masa rezim Pak Soeharto etnis Tionghoa hanya memiliki hak memilih dan tidak berhak untuk memilih, dan pada saat ini mereka mempunyai hak dipilih dan hak untuk memilih. Pemilu memberikan kesempatan terbuka bagi etnis Tionghoa untuk berperan aktif didalam perpolitikan tanah air.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian di daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjungpinang, yang mana daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki presentase jumlah masyarakat etnis Tionghoa yang cukup tinggi dibuktikan dengan jumlah penduduk kelompok etnis Tionghoa pada tabel berikut yang dikutip dari buku Nicholas J. Long, *Being Malay in Indonesia: Histories, Hopes and Citizenship in the Riau Archipelago*.

Tabel.1
Komposisi Etnis di Kota Tanjungpinang tahun 2010

Etnis	Jumlah (%)
Melayu	30,7
Jawa	27,9
Tionghoa	13,5
Minangkabau	9,5
Batak	6,6
Sunda	2,8
Bugis	1,9
Lain-lain	7,1

Sumber: Sensus Penduduk Tahun 2010 (Nicholas J. Long, 2013)

Sebelum Provinsi yang terpisah itu, Kepri adalah sebuah kabupaten yang terdiri dari untaian pulau-pulau yang letaknya dekat dengan Singapura, termasukn Pulau Bintan dan Karimun tidak termasuk Batam yang sudah menjadi kota Industri dalam kebijakan pemerintah mengenai Otorita Batam. Tanjungpinang terletak di Pulau Bintan sampai tahun 2001 adalah Ibukota Kabupaten, tak lama setelah kejatuhan Soeharto dan permulaan proses desentralisasi, virus pemekaran juga merasuki para pemimpin lokal di Tanjungpinang, ketika gagasan pertama tentang pemisahan antara Riau daratan dengan Ibukotanya Pekan baru, dan Kepulauan Riau yang disodorkan kepada publik.(Faucher,2003).

Dalam Jurnalnya, Carole Faucher juga mengutip berita dari Jakarta Post yang mengungkapkan Tak lama kemudian Tanjungpinang menjadi Kota Otonom dan Kabupaten Karimun, yang mencakup bagian Barat Kepulauan Riau pun akan diciptakan. Hal-hal itu merangsang persaingan sengit antara kabupaten Kepri dan Karimun serta dua Kota Tanjungpinang dan Batam, untuk mengembangkan hubungan ekonomi dengan Singapura dan Malaysia. Selama periode yang sama, Huzrin Hood, yang waktu itu menjabat sebagai Bupati Kepri meluncurkan sebuah gagasan membentuk sebuah provinsi melayu tersendiri yakni Provinsi Kepri.(Jakarta Post 21-5-2003).

Sejarah silam tentang etnis Tionghoa di Kota Tanjungpinang memang sedikit sekali atau hampir tidak tercatat dalam sejarah namun setelah reformasi peningkatan partisipasi politik oleh etnis Tionghoa ini sangat tinggi.Hal ini tidak dapat dipungkiri karena kaum Tionghoa yang berperan penting dalam ekonomi politik dan hubungan antara investor dari Singapura yang masuk ke Kepri yang di pegang oleh sebagian besar etnis Tionghoa di Kepri. Dapat dilihat dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau sudah bannyak aktor-aktor politik yang muncul dari kalangan etnis Tionghoa seperti Hendry Frankim yang

pernah menjabat sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan Kepulauan Riau, Bobby Jayanto yang pada priode 2004-2009 menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Rudy Chua sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2009-2014 serta Reni dan Beni yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang 2009-2014.

Hal ini menjadi menarik, melihat kondisi diatas yang membuktikan kontribusi dan partisipasi politik etnis Tionghoa di Kota Tanjungpinang cukup besar, padahal ditinjau dari sejarah pembentukan Provinsi Kepri adalah kekuatan kemelayuan dari etnis melayu yang ingin adanya Provinsi Melayu yakni Kepulauan Riau itu sendiri.

Trust yang dibangun Etnis Tionghoa di Kepri sangatlah besar baik dalam Ekonomi maupun Politik. Trust merupakan pendekatan yang menunjukkan beberapa kata kunci penting, yaitu *expectations* dan *the action of others*, hal ini menggambarkan bahwa konsep *trust* membawa konotasi aspek negosiasi harapan dan kenyataan yang dibawa oleh tindakan sosial individu-individu atau kelompok dalam kehidupan kemasyarakatan. Ketepatan antara harapan dan realisasi tindakan yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok dalam menyelesaikan amanah yang diembannya, dipahami sebagai tingkat kepercayaan. Jadi *trust* merupakan “buah” dari pengalaman aktor-aktor dalam masyarakat dalam menjalin interaksi sosial terkait dengan persoalan tertentu. Ada semacam hukum *trust* dari interaksi tersebut, yaitu tingkat kepercayaan akan tinggi, bila penyimpangan antara harapan dan realisasi tindakan, sangat kecil. Sebaliknya, tingkat kepercayaan menjadi sangat rendah apabila harapan yang diinginkan tak dapat dipenuhi oleh realisasi tindakan social (Dharmawan, 2002).

Jadi dalam hal ini untuk lebih jauh akan penulis bahas Identitas social yang terbangun oleh Etnis Tionghoa di Tanjungpinang Provinsi Kepri sehingga membentuk Trust antar Etnis Tionghoa di Kepri dalam Politik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian dengan metode kualitatif yaitu nilai yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka (statistik). Jadi, data kualitatif adalah data yang berupa kata atau kalimat, gambar, skema yang belum diangkakan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Pada penelitian ini terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara objektif. Oleh karena itu penelitian deskriptif pada umumnya menggunakan kata tanya “bagaimana” dalam merumuskan kalimat pertanyaan penelitiannya.

Lokasi penelitian ini ialah di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan Jenis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dan menganalisa data sekunder kajian pustaka yaitu dengan mencari sumber data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ini dengan melakukan kajian puska dan mencari sumber di medi-media cetak maupun online untuk menjawab pertanyaan terkait masalah yang akan diteliti.

KERANGKA TEORITIS

Dalam penulisan ilmiah ini penulis mengambil beberapa landasan teori dan

konsep yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas yakni Trust, Identitas Sosial, Etnis, dan Strategi dan Politik. Selanjutnya akan dijabarkan satu persatu :

1. Trust

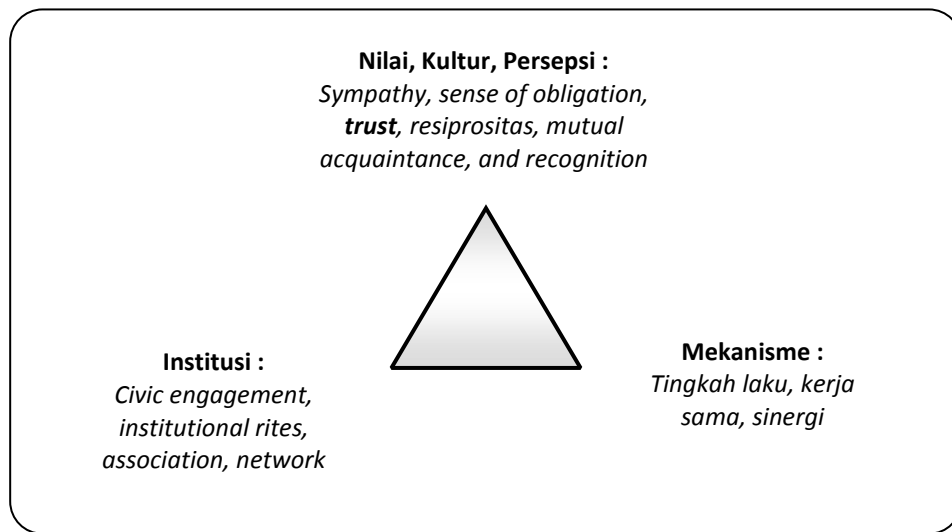
Tabel 2. Konsepsi Trust

NO	KONSEP	SUMBER
(1)	(2)	(3)
1.	<i>“a state of favorable expectation regarding other people’s actions and intentions. As such it is seen as the basis for individual risk-taking behavior, cooperation, reduced social complexity, order, and social capital”.</i> MÖLLERING (2001)	Dharmawan (2002)
2.	<i>Trust consists of acceptance of risk and vulnerability deriving from the action of others and an expectation that the other will not exploit this vulnerability (Humphrey, 1998, pp. 216–217).</i>	Derrick Purdue (2001)
3.	<i>trust is essentially a psychological state that manifests itself in the behavior toward others (Kramer, 1999). As a psychological state, trust comprises positive expectations and the willingness to become vulnerable to the actions of others (Rousseau et al., 1998). Positive expectations refer to the belief in the trustee(s): (a) ability or competence on various performance dimensions, (b) benevolence or goodwill toward the trustor, and (c) integrity or the willingness to fulfill the commitments to trustors (Mayer et al., 1995).</i>	Ana Cristina Costa and Katinka Bijlsma-Frankema (2007)

(1)	(2)	(3)
4.	<i>Trust is 'an abstract concept but one whose origins are firmly rooted in experience; individuals' interactions with other people and their past experiences with institutions create expectations about how they will be treated in the future' (Mishler and Rose, 1998: 5).</i>	Andrew Goldsmith, 2005
5.	<i>trust: '[Trust is] the expectation that arises within a community of regular, honest and cooperative behavior, based on commonly shared norms, on the part of other members of that community. Those norms can be about deep 'value' questions like the nature of God or justice, but they also encompass secular norms like professional standards and codes of behavior.'</i>	Fukuyama, 1996.

Sumber : (Dedy Hermawan,2008).

Konsep-konsep *trust* di atas menempatkan *trust* sebagai komponen yang menyatu dan mengakar dalam keseharian aktivitas sosial kemasyarakatan. Kenyataan ini menjadikan *trust* oleh beberapa ilmuwan sosial dikategorikan sebagai modal sosial (*social capital*), sebut saja Putnam (1993) yang menyatakan "*features of social life – **networks, norms, and trust** – that enable participants to act together more effectively to pursue shared objectives*". Modal sosial sering dikaitkan dengan variabel penting dalam rangka menjaga integrasi sistem sosial dan modal sosial ada didalamnya.



Gambar 1 : Level Modal Sosial (Mariana, 2006)

Modal sosial pada gambar di atas merupakan konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi sosial. Pengertian modal sosial yang berkembang selama ini sebagaimana merujuk gambar di atas mengarah pada terbentuknya tiga level modal sosial, yakni pada level nilai, institusi, dan mekanisme. Terkait dengan modal sosial Fukuyama (1996) senada dengan Putnam, menyatakan bahwa *trust* merupakan “jiwa” dari *social capital*. Posisi mendasar *trust* ini yang akan mempengaruhi bangunan sosial suatu masyarakat, struktur sosial yang kuat *high trust society* manakala kelembagaan *trust* terinternalisasi dengan kokoh, dan sebaliknya ikatan-ikatan konstruksi sosial melemah *low trust society* ketika *trust* melemah. Bahkan Fukuyama mengajukan kategori masyarakat yang dikotomis: masyarakat *high-trust* dan masyarakat *low-trust*. Jenis pertama menunjukkan tingkat *trust* yang tinggi dan terus berkelanjutan di bawah otoritas politik yang sudah didesentralisasi pada tahap pra-modern. (Hermawan, 2008)

Berdasarkan pengertian Trust di atas penulis akan melihat Trust berdasarkan etnisitas Tionghoa di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, untuk itu akan dijabarkan pula konsep dan pengertian etnis dan etnisitas.

2. Etnis

Kelompok etnis biasanya mengacu kepada kelompok-kelompok yang membangun ras, satu ras masih bisa terdiri dari berbagai macam kelompok etnis. Akan tetapi sebaliknya, ras bersama-sama agama atau kepercayaan, asal usul, dan kebangsaan juga membangun konsep etnis. Ras juga menunjuk pada konsentrasi perbedaan atas unsur genetis, yang tercermin dalam bentuk penampakan fisik orang, seperti warna kulit, bentuk dan warna rambut, dan tidak ada hubungannya dengan institusi dan pola budaya. Ras hanya sedikit yang mengandung konotasi budaya, bahasa, dan agama.

Etnis adalah kata yang bersumber dari pakar sosiologi dan antropologi. Di beberapa negara, etnis digunakan untuk menyebut "suku". Namun dalam situasi yang lain, etnis digunakan untuk menunjukkan agama, bahasa, warna kulit, asal usul daerah ataupun tempat tinggal. (Sochmawardiah:2013,62)

Kata etnis berasal dari kata Yunani *ethos*, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Menurut Martin Bulmer, "etnis atau kelompok etnis adalah kolektivitas dalam populasi yang besar, memiliki jalur keturunan yang secara umum sama, terlepas dari apakah itu nyata atau sekedar kepercayaan, mempunyai memori terhadap masa lalu yang sama, dan fokus kultural terhadap satu atau lebih elemen-elemen simbolik yang menjelaskan identitas kelompoknya, misalnya agama, kekeluargaan bahasa, teritori bersama, nasionalitas dan tampilan fisik yang relatif sama. (Sochmawardiah:2013,62).

Dalam ilmu sosial kontemporer, sebuah kelompok etnis dicirikan oleh atribut-atribut yang beragam. Atribut itu misalnya; agama, sekte, kasta, daerah, bahasa, nasionalisme, keturunan, ras, warna kulit, dan kebudayaan. (T.K.Oommen,2009:54)

3. Etnisitas

Menurut Jhon Rex, etnisitas merupakan kategori yang diterapkan pada kelompok-kelompok atau kumpulan orang yang dibentuk dan membentuk dirinya dalam kebersamaan atau kolektivitas. Konsep etnisitas ini sinonim dengan stratifikasi dan sistem pada diferensiasi etnis secara vertikal yang bersifat hirarkis. Pada konteks ini mobilitas sosial dan politik terhambat oleh kriteria askriptif, misalnya warna, status atau *phenotype* sejenis. Seringkali kelompok etnis yang bersifat superordinat dan subordinat terbentuk, hal ini menciptakan relasi antar kelompok yang bercorak kasta dan hirarkis, serta penuh dengan perbedaan dan ketimpangan struktural, dan juga ketegangan antagonis, contohnya relasi ras yang terdapat pada perbudakan kelompok kulit putih di barat terhadap kelompok kulit hitam, atau pada dominasi etnis Tionghoa di Indonesia dalam perekonomian. (Sochmawardiah, 2013:65)

4. Konseptual China, Cina, Dan Tionghoa

Ada sebagian besar Etnis Tionghoa di Indonesia tidak mau disebut dengan sebutan Tionghoa karena mereka menganggap mereka adalah Etnis Cina yang memiliki banyak suku yakni Tio Ciu, Hok Cia, Hakka/Khek, Hokkien, Katon dan Tionghoa merupakan salah satu penyebutan suku dari keberagaman etnis di China. (M.A. La Ode, 2012:4)

Sementara paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia merujuk kesejarah dimana masyarakat Etnis Cina di Indonesia adalah berasal dari Tongkok dan bersuku Tionghoa sehingga etnis Cina di Indonesia di sebut dengan Tionghoa, meskipun argumen ini sulit dimengerti dan di sepakati mengenai istilah China, Cina dan Tionghoa akan di jabarkan sebagai berikut:

a. China

China adalah penulisan resmi yang diinginkan oleh kedaulatan Republik Rakyat China. (Suryadinata,2005:398)

b. Cina

Cina adalah orang cina yang berwarga negara China,yang setara dengan penyebutan orang Jepang, orang Indonesia, orang Malaysia, dan lain sebagainya. (Suryadinata,2005:398)

c. Tionghoa

Tionghoa merupakan keturunan Cina di Indonesia yang secara khas sering disebut dengan nama Tionghoa, dengan demikian akan mudah membedakannya, bahwa orang Cina warga Negara Asing (WNA), dan orang Tionghoa yang Warga Negara Indonesia(WNI). Orang Tionghoa sepadan dengan orang Jawa,orang Sunda, Orang Madura,dan lain-lain.(Suryadinata,2005:398)

Istilah Tionghoa atau peranakan tionghoa sesuai hukum dan konstitusional tercantum dengan jelas pada pasal 26 UUD 1945 yang sampai saat ini berlaku seperti hukum positif, berbunyi:

“yang menjadi Warga Negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara”

Kemudian pada pasal 26 di atas ditegaskan pada penjelasan bahwa:

“yang dimaksud orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda,peranakan Tionghoa (bukan perakan Cina) dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia menjadi sebagai Tanah Airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi Warga Negara.”

Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia berpendapat bahwa untuk orang-orang keturunan Cina di Indonesia secara kebangsaan (*nationality*) di

sebut sebagai orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Sedangkan secara etnisitas disebut sebagai orang Tionghoa, etnis atau suku Tionghoa. (Suryadinata,2005:398)

5. Identitas Sosial

Secara alamiah, setiap individu memiliki kebutuhan untuk menjalin dan memiliki hubungan dengan individu lainnya. Kebutuhan ini selanjutnya mengantarkan mereka untuk menciptakan ikatan-ikatan sosial tertentu sebagai syarat lahirnya kelompok sosial. Selama proses ini berlangsung mereka akan menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan baik itu terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan-kepentingan maupun unsur-unsur pembentuk konsep diri mereka. Kelompok sosial inilah yang kemudian mampu berperan sebagai sumber identitas dan pemberi rasa aman bagi anggota-anggotanya, baik ketika mereka sedang berinteraksi maupun ketika sedang menangkai ancaman-ancaman dari kelompok lain.

Dalam buku Identitas Tionghoa Muslim di Indonesia Afthonul Afif mengutip beberapa pengertian tentang identitas Sosial di antaranya sebagai berikut :
Identitas sosial terbentuk dari keterlibatan, rasa peduli, dan rasa bangga individu bagian dari kelompok sosial yang dinaunginya. (Hogg dan Abram, 1990:2-3).

Teori Identitas sosial memiliki tiga asumsi utama : (1) setiap individu akan berusaha mempertahankan konsep dirinya yang positif; (2) konsep diri tersebut lahir dari identifikasi terhadap kelompok sosial yang lebih besar; (3) upaya individu dalam mempertahankan konsep dirinya yang positif itu cenderung dilakukan melalui cara membanding-bandingkan kelompoknya dengan kelompok lain. (Operario dan Fiske, 1999:26-54)

6. Politik Identitas

Konsep ini dijelaskan oleh Gabriel Almond (dalam Handoko, 2009) secara panjang lebar dan mudah dimengerti, yaitu sebagai berikut ini. Sarana-sarana, pengalaman-pengalaman, dan pengaruh-pengaruh tersebut, yang semuanya membentuk sikap-sikap individu, selanjutnya menciptakan apa yang disebut “politik identitas” seseorang, yaitu suatu kombinasi dari beberapa perasaan dan sikap:

1. Di dalam sistem politik terdapat sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan dasar seperti nasionalisme, identifikasi etnik atau kelas, keterikatan ideologis, dan perasaan fundamental akan hak-hak, keistimewaan dan kewajiban pribadi;
2. Kurang terdapat komitmen emosional terhadap, dan pengetahuan tentang, lembaga-lembaga pemerintahan dan politik seperti pemilihan umum, struktur badan perwakilan, kekuasaan badan eksekutif, struktur badan pengadilan; dan system hukum;
3. Lebih banyak terdapat pandangan-pandangan yang cepat berubah tentang peristiwa-peristiwa, kebijaksanaan politik, issue-issue politik dan tokoh-tokoh politik yang sedang terkenal. Politik identitas memang sejauh ini dipahami dan diarahkan dalam artian identitas personal dan identitas kolektif seperti identitas yang dibangun atas dasar gender, orientasi seksual, suku, agama dan bangsa.

Tentu saja identitas seperti ini penting tetapi pada saat yang sama sebuah afirmasi atas identitas manusiawi yang universal sangat krusial di mana identitas khusus bisa ditempatkan dalam bingkai identitas manusia yang universal sebagai sebuah politik identitas. Politik identitas perlu didasari oleh etika dan tanggung jawab global dan disemangati oleh roh solidaritas antar manusia. Tidak begitu saja menutup mata atas kenyataan perbedaan politis,

budaya dan sosial antar masyarakat atau komunitas. Tetapi memahami atau lebih tepat memberi definisi baru atas politik perbedaan. Perbedaan adalah sumber-sumber energi moral yang kaya yang perlu diberi struktur baru dalam terang harmoni identitas universal. Perbedaan dan nilai universal karena itu bukanlah dua hal yang bertentangan tetapi saling melengkapi.

PEMBAHASAN

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya berasal dari Etnis Melayu. Otonomi daerah memberikan kesempatan lebih untuk mengembalikan kembali ke masa ketika Tanjungpinang menjadi jantung bagi ranah melayu dan mempunyai kedudukan yang mantap dalam ekonomi kawasan itu. Tindakan memisahkan diri dari Provinsi Riau yang beribukota Pekanbaru dengan tujuan membentuk Provinsi Kepulauan Riau sepintas lalu dipandang sebagai jawaban terbaik bagi keterpecahbelahan ideologis yang sudah lama terjadi pada identitas Melayu itu (Faucher, 2014:580)

Meskipun ingin menciptakan sebuah provinsi atas dasar etnis yang akan menguntungkan bagi orang-orang melayu, dalam realita populasi pulau Batam, Karimun dan Bintan adalah migran. Dengan demikian akan jauh lebih sulit untuk menekan kemelayuan lokal sebagai penanda sebuah identitas provinsi ini, untuk mengatasi hal ini, elit melayu dan para akademisi lokal di kepri berusaha menghidupkan kembali suatu solidaritas melayu 'serumpun' yang bersifat trans-nasional. Tetapi pada saat yang sama perkawinan campuran sangat umum, khususnya di daerah perkotaan, yang membuat masalah-masalah identitas etnis semakin kompleks.

Secara keseluruhan, komposisi etnis sangat tidak merata. Meskipun Melayu merupakan mayoritas di daerah pedesaan -85% di Lingga dan Natuna, akan

tetapi di Kota misalnya Tanjung Balai Karimun dan Tanjungpinang, melayu tidak lebih dari 40% saja. Di Tanjungpinang Jawa merupakan etnis terbesar kedua dengan angka 25%, sementara etnis Tionghoa menjadi kelompok ketiga terbesar dengan 13%. Jika pada gambaran ini kita tambahkan arus migran terbaru, orang bisa menyatakan bahwa setidaknya-tidaknya di Tanjungpinang sudah tercipta suatu jaringan pluralistik multietnis setelah desentralisasi. (Faucher, 2014: 581)

Kepri masih mengacu pada kemelayuan akan tetapi Melayu dalam provinsi Kepri saat ini hanya sebagai praktik kebudayaan dalam pertunjukan seni saja. Walikota Tanjungpinang selalu mengagendakan Revitalisasi Budaya Melayu setiap tahunnya, akan tetapi hal ini saja ditentang oleh sebagian tokoh etnis Tionghoa di senggarang Kota Tanjungpinang, karena mereka menginginkan pemerintah tidak memungkiri bahwa kota Tanjungpinang adalah kota yang pluralis-multietnis.

Tidak hanya disitu saja, kemunculan aktor-aktor politik dari Etnis Tionghoa dalam kancah perpolitikan di Kepri khususnya Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa masyarakat Etnis Tionghoa di Kepri sangat berpengaruh di Tanjungpinang, apalagi dengan terpilihnya Bobby Jayanto sebagai ketua DPRD Kota Tanjungpinang periode 2004-2009 dan sekaligus sebagai orang pertama di Indonesia dari Etnis Tionghoa yang menjabat sebagai Ketua DPRD. (Media Antara-Kepulauan Riau, 1/22/2014).

1. Perubahan Situasi Sosial Politik

Seiring waktu berjalan dalam kancah perpolitikan di Tanjungpinang tidak hanya dari seorang Bobby Jayanto yang beretnis Tionghoa yang terlibat akan tetapi mulai bermunculan aktor-aktor dan tokoh lain seperti Hendry Frankim

yang pernah menjabat sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan Kepulauan Riau, Rudy Chua sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2009-2014 serta Reni dan Beni yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang 2009-2014.

Reformasi juga melahirkan tokoh-tokoh dari kalangan etnis Tionghoa yang berhasil duduk di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Lingga, dan Tanjungpinang. "Reformasi 1998 seperti gelombang yang memberi pembelajaran politik kepada kami," kata pengurus Perhimpunan Tionghoa Kota Tanjungpinang, Reina yang juga anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Perjuangan Indonesia Baru.

Reina memiliki usia termuda dibanding 24 anggota DPRD Kota Tanjungpinang lainnya yang dipilih berdasarkan Pemilu 2009. Dia dilantik menjadi anggota DPRD Tanjungpinang pada 31 Agustus. "Sebelumnya saya bekerja di asuransi," kata anggota dewan yang baru setahun lebih terjun ke dunia politik. Sementara Beni, rekan Reina yang juga duduk sebagai anggota DPRD Tanjungpinang reformasi mengawal karirnya di dunia politik. "Dulu saya kader PDIP," kata Beni. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)

Beni dan Reina mengaku tertarik di dunia politik. Mereka berkeyakinan akan lebih mudah menyalurkan aspirasi masyarakat setelah duduk di lembaga legislatif. "Itu lembaga strategis untuk menyampaikan aspirasi seluruh masyarakat," katanya. Mereka berjanji akan bekerja maksimal dan tidak akan mengecewakan masyarakat. Tugas yang paling penting di awal jabatannya adalah membenahi fasilitas umum seperti air dan listrik yang saat ini mengalami krisis dan dikeluhkan masyarakat. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)

"Kami akan mendorong membentuk sinergisitas di internal DPRD Tanjungpinang, dan menjali hubungan kerjasama yang aktif dengan eksekutif, yang bertujuan memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat," katanya. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)

Sedangkan Rudy Chua terpilih menjadi anggota DPRD Kepulauan Riau pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Dia mengawal karirnya di Partai Patriot, kemudian hijrah ke Partai Perjuangan Indonesia Baru. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)

"Tokoh-tokoh etnis Tionghoa memulai karirnya di legislatif pada tahun 2004," kata Rudy. Lima tahun yang lalu, tokoh-tokoh etnis Tionghoa seperti Hendry Frankim berhasil menjadi anggota DPD RI daerah pemilihan Kepulauan Riau, Bobby Jayanto Ketua DPRD Tanjungpinang periode 2004-2009 dan Saptono Mustaqim Wakil Bupati Kabupaten Lingga. "Beberapa anggota DPRD Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, Lingga dan Karimun berasal dari etnis Tionghoa," katanya. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009).

Kemudian tidak hanya itu banyak tokoh Tionghoa lain yang turun dan terlibat dalam partai politik, LSM dan Ormas. Kekuatan yang mereka bangun tidak hanya dari sector identitas politik etnis saja, dengan sendirinya banyak kebijakan-kebijakan yang memihak terhadap etnis tionghoa karena sudah di berbagai sector mereka kuasai membuat pemerintah seakan tunduk dengan perpolitikan yang dilakukan Etnis Tionghoa di Kepri, misalnya dalam aspek Budaya, Pendidikan, Agama dan Ekonomi. Beberapa aspek ini akan dibahas satu-persatu karena aspek-aspek tersebut berkaitan dengan modal social yang dibangun Etnis Tionghoa di Kepri.

2. Aspek-aspek lain yang mempengaruhi Meningkatnya Modal Social Etnis Tionghoa

A. Aspek Budaya dan Agama

Pengenalan terhadap aspek sosial budaya merupakan hal yang penting dalam perencanaan dan pembangunan suatu kota, kondisi sosial budaya masyarakat akan berpengaruh terhadap perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk dalam pembangunan sanitasi permukiman. Karakteristik sosial budaya penduduk di wilayah perencanaan secara garis besar bersifat heterogen yang terdiri dari percampuran suku bangsa dan golongan etnis seperti Melayu sebagai penduduk asli/lokal yang telah turun temurun bermukim di daerah ini dan sebagian lainnya berasal dari suku Batak, Minang, Jawa, Tionghoa, Bugis (Sulawesi) dan dari daerah lainnya di Sumatera serta berbagai suku bangsa lainnya. Dengan kondisi demikian, pluralisme sudah menjadi ciri khas utama kebudayaan masyarakat Kota Tanjungpinang. Sebagian penduduk Kota Tanjungpinang merupakan penduduk kepulauan yang hidupnya bersentuhan langsung dengan karakteristik laut, seperti musim angin, musim ikan, daya jangkau laut antar pulau. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat setempat dan mempengaruhi pola sanitasi dan perilaku hidup bersih dengan adanya gerak keluar yang relatif dominan dan gerak ke dalam yang kurang sehingga pola kehidupan sosial masyarakatnya lebih terbuka.

Dengan terbukanya pola kehidupan masyarakat Kota Tanjungpinang membuat semakin mudahnya masyarakat Tionghoa di Tanjungpinang untuk mengeksplorasi dan memperkenalkan budaya mereka apalagi sejarah mengatakan bahwa di salah satu tempat yang ada di Kota Tanjungpinang yakni Senggarang adalah tempat awal mula masuknya orang-orang tiongkok di Tanjungpinang. Banyak sekali yang terpengaruh dan mempelajari budaya

Tionghoa disana sehingga budaya melayu mulai tergeser dan hanya menjadi pertunjukan seni saja.

Di abad ke 18, Daeng celak, bergelar Yang Dipertuan Muda Riau II (1728-1748) memberikan kelonggaran bagi imigran (pendatang) dari China untuk menempati kawasan Senggarang yang letaknya persis berhadapan dengan Kota Tanjungpinang dan Pulau Penyengat. Kini, suasana Tiongkok itu masih terasa kental.

Berjalanlah ke Senggarang, maka Anda akan merasakan kentalnya suasana dan budaya masyarakat etnis Tionghoa. Di wilayah yang dikembangkan Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai pusat pemerintahan ini masih terdapat jejak peradaban masyarakat Tionghoa yang pada abad ke 18 lalu mulai menempati kawasan tersebut. Rumah-rumah berada di kawasan pesisir yang didominasi warga keturunan Tionghoa, atau bangunan berusia ratusan tahun yang masih berdiri kokoh. Bangunan dimaksud berupa tempat peribadatan atau fasilitas pendukung lain, seperti jalan.

Salah satu peninggalan kebudayaan Tiongkok tertua yang masih tersisa di Senggarang adalah beberapa bangunan yang berada di dalam kompleks Vihara Dharma Sasana. Komplek vihara ini berada di ujung Senggarang, menghadap laut ke arah pusat Kota Tanjungpinang dan Pulau Penyengat. Kendati daratan Senggarang menyatu dengan Pulau Bintan, namun beberapa penduduk sekitar menyebut Senggarang dengan Pulau Senggarang.

Di lahan luas dan asri kompleks Vihara Dharma Sasana, terdapat tiga klenteng yang dibangun pada abad ke 18, atau lebih tepatnya ketika Yang Dipertuan Muda Riau II Daeng Celak memimpin Kerajaan Melayu Riau-Pahang-Lingga. Tiga klenteng itu yakni Klenteng Fu De Zheng Shen, Klenteng Yuan Tiang Shang Di dan Klenteng Tian Hou Sheng Mu. Ketiganya berdiri sejajar di

deretan paling depan, dilengkapi patung dewa. Diantaranya Dewa Phe Kong, Dewa Ma Chou dan Dewa To Po Kong.

Klenteng itu masing-masing memiliki fungsi peribadatan berbeda: untuk keselamatan dalam perjalanan laut, keselamatan perjalanan darat dan keselamatan bagi orang yang telah meninggal.

Menurut Ahok, salah seorang penjaga klenteng tersebut, salah satu dari ketiga klenteng tersebut usianya bahkan sudah lebih dari 300 tahun. Ini dapat dilihat dari ornamen-ornamen maupun bahan bangunan yang ada di setiap klenteng. Seperti ukir-ukiran kayu yang menjadi penghubung ke rangka pondasi atap, lukisan relief, serta tiang pondasi berbahan batu kali yang didatangkan langsung dari Tiongkok. (<http://disparekraf.tanjungpinangkota.go.id>)

Selain tiga klenteng tadi, terdapat sebuah bangunan induk Vihara Dhrama Sasana. Bangunannya modern, berada di bagian belakang. Bangunan itu berada di tanah yang cukup tinggi, tegak di antara dua patung berukuran "raksasa". Kedua patung berukuran tinggi sekitar 5 meter itu yakni patung Budha dan Dewa Kwan Im, berjarak cukup dekat diantara rindangnya pepohonan.

Selain patung dewa itu, di sana juga terdapat patung Sun Go Kong, Si Kera Sakti bersama Pat Kai dan Wu Ching yang mengawal Biksu Tong. Posisinya juga di bagian belakang. Mengelompok, menggambarkan perjalanan mereka saat menjalankan misi kerohanian menuju Barat. Di Senggarang, selain kompleks Vihara Dhrama Sasana, terdapat pula beberapa Klenteng yang usianya tak kalah tua. Diantaranya Klenteng Sun Te Kong (berusia sekitar 300 taun), Klenteng Marco (didirikan pada abad ke 17), Klenteng Tay Ti Kong, Klenteng Beringin (Tien Shang Miao) yang berusia 200 tahun lebih dan

Klenteng Anio yang terletak di tengah hutan Sungai Ular di Kampung Bugis. (<http://disparekraf.tanjungpinangkota.go.id>)

Dari data yang di dapat dari dinas pariwisata ekonomi kreatif kota tanjungpinang sendiri sudah dapat dilihat bahwa dari zaman kerajaan pun Tionghoa di Tanjungpinang sangat berpengaruh penting, kemudian dari banyaknya Vihara dan tempat ibadah yang di tinggalkan sebagai situs budaya etnis Tionghoa membuat kebudayaannya yang masih kental dan dapat mempengaruhi rasa integritas masyarakat Etnis tionghoa disana untuk menjaganya dan bahkan mengembangkannya.

B. Aspek Pendidikan

Aspek Pendidikan di Kota Tanjungpinang sudah sangat banyak dan sudah ada beberapa tempat pendidikan yang dimiliki oleh etnis Tionghoa dan beberapa sekolah yang mayoritas Tionghoa, diantaranya Pelita Nusantara Kota Tanjungpinang, SMP Katolik Tanjungpinang, SMA Katolik Tanjungpinang, Bimbel-bimbel dan Yayasan-yayasan Tionghoa yang bergelut di bidang pendidikan yang ada di Vihara-vihara dan tempat lainnya. Dari sektor pendidikan etnis tionghoa di tanjungpinang sangat berperan dan berpengaruh, disini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilakukan serta sudah ditetapkannya mata pelajaran Konghucu sebagai muatan Lokal di beberapa sekolah mayoritas tionghoa di Tanjungpinang.

C. Aspek Ekonomi

Roda perekonomian dan bisnis di Indonesia sampai saat ini masih 90 persen dikuasai oleh orang-orang maupun kelompok-kelompok keturunan dan pendatang (perantau) dari China Tionghoa. Hal ini bukanlah sesuatu berita aneh lagi di Indonesia. Memang kenyataannya demikian sejak zaman-zaman kerajaan di Nusantara ini sampai dengan sekarang. Itupun terbukti banyaknya

orang-orang atau kelompok-kelompok keturunan dan perantau dari China Tionghoa menjadi konglomerat dan raja uang di Indonesia.

Peran etnis China Tionghoa di bidang ekonomi semakin meluas pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan Demokrasi Terpimpin. Keberhasilan usaha mereka dalam menagmbil alih perusahaan-perusahaan besar belanda yang di nasionalisasikan juga tidak kalah memiliki arti strategis bagi kelanjutan dan pertumbuhan bisnis mereka di Indonesia.

Kemudian pada era Pemerintahan Orde Baru kepemimpinan **Soeharto** (*Presiden RI Ke Dua*), etnis China Tionghoa kelas menengah telah melakukan Human Capital besar-besaran di bidang pendidikan, terutama yang bersifat teknis dan manajerial. Politik rasial masih di jalankan secara terang-terangan di masa pemerintahan Orde Baru. (Mahfud, 2013)

Pada saat yang sama sejak awal Orde Baru, **Soeharto** bersama rezimnya menggunakan etnis China Tionghoa sebagai kuda beban yang menarik kereta Orde Baru untuk mengejar tingkat kemakmuran sesuai dengan keyakinan pemerintah. Pusat Data Bisnis Indonesia antara tahun 1992-1996 mencatat 300 konglomerat yang mayoritas keturunan China Tionghoa menguasai penjualan Rp. 227,2 triliun dengan aset Rp. 425 triliun. (Mahfud, 2013)

Walau dengan catatan ekonomi yang spektakuler dari kalangan pebisnis etnis China Tionghoa pemerintah Orde Baru tetap melancarkan politik rasialnya dengan memasang rambu-rambu yang membuat pebisnis etnis China Tionghoa tidak dapat berbuat banyak. Kendali etnis China Tionghoa terhadap kegiatan perekonomian bagaimana pun akhirnya memicu kecemburuan dan kebencian dari kalangan pribumi Indonesia. Demonstrasi justru berakhir dengan penyerangan dan penghancuran rumah-rumah etnik China Tionghoa.

Gaya pembangunan ekonomi elitisme yang di pertontonkan Orde Baru ternyata memang rapuh. Di picu oleh krisis moneter yang berlarut-larut kalangan masyarakat lalu bergerak dengan sejuta amarah dan ketidakpuasan terhadap situasi dan kondisi kehidupan sosialnya. Akhirnya terjadilah kerusushan Mei 1998 sudah tentu sangat berpengaruh pada pelaku bisnis etnis China Tionghoa. Diantara mereka banyak yang lari keluar negeri, dan sebagian ada yang melarikan modalnya juga. Usaha perniagaan etnis China Tionghoa di kota-kota besar secara umum vakum. Mereka baru berani bangkit setelah ada jaminan keamanan dari **Presiden Habibie (*Pengganti Presiden Soeharto setelah langser di lengserkan oleh mahasiswa*)**. (Mahfud, 2013)

Selanjutnya era Reformasi di Indonesia ditadain dengan komitmen bersama untuk membangun sistem demokrasi yang substantif, demokrasi yang melahirkan kesejahteraan. Reformasi dibayangkan akan menghasilkan perubahan dan kemajuan setahap demi setahap karena memang sangat berlainan artinya dengan revolusi. Di dunia bisnis, krisis ekonomi 1998 memang memicu ambruknya banyak konglomerat terutama keturunan etnis China Tionghoa karena menggunakan bank sendiri untuk mendanai proyek bisnis dengan rentabilitas rendah. Sedangkan menurut catatan di Bursa Efek setelah krisis Moneter 1997-1998, kekuatan ekonomi konglomerat keturunan China Tionghoa rupanya tidak serta merta meredup. Hingga saat ini tampaknya penguasaan bisnis konglomnerat keturunan etnis Tionghoa masih kuat.

Sesungguhnya yang paling terpukul langsung akibat krisis moneter Asia adalah perekonomian nasional yang begitu rapuhnya karena di gerogoti oleh bisnis para pejabat dan pengurus partainya. "***Wait and see***" adalah satu-satunya sikap yang di anggap lebih bijaksana untuk merespons kampanye pebaikan ekonomi di pemerintahan orde Reformasi yang silih berganti ini. Pelaku

ekonomi etnis China Tionghoa sesungguhnya masih menunggu langkah-langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki situasi perekonomian dan usaha nasional. Namun demikian bisnis harus berjalan terus. Dalam situasi negara yang diwarnai oleh berbagai bentuk kampanye anti **KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)** ini pelaku ekonomi etnis China Tionghoa tampaknya menjadi lebih terfokus dan bahkan cukup merasa aman memilih berbasis di sektor hilir dengan tingkat resiko yang kecil namun masih dapat menguntungkan.

Tidak bisa dipungkiri peranan etnis Tionghoa dalam berbagai bidang di Indonesia telah mampu memberi warna bagi kehidupan berbangsa dan budaya Indonesia. Tidak hanya di sektor ekonomi, tapi juga sektor lainnya. Etnis ini mampu berperan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari kemampuan adaptasi dan keuletan yang dimiliki sehingga mayoritas bisa meraih sukses. Sekretaris PSMTI Kota Tanjungpinang, Fredy mengatakan Etnis Tionghoa mampu memegang peranan dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya karena mereka pada dasarnya adalah bangsa yang ulet dan mampu beradaptasi dengan mudah. Di samping itu, faktor disiplin dan keseriusan juga menjadikan pengusaha dari kalangan etnis Tionghoa banyak yang bisa meraih sukses. "Semangat pantang menyerah dan daya adaptasi terhadap lingkungan yang tinggi menyebabkan etnis Tionghoa bisa cepat membaca peluang sehingga dalam berusaha mereka bisa selangkah lebih maju dibanding pengusaha dari etnis lainnya," kata Fredy. (Haluan kepri, Selasa. 12/7)

Sejarah mencatat di awal kedatangan etnis Tionghoa ke Tanjungpinang sejak ratusan tahun lalu, etnis ini mampu memanfaatkan peluang untuk membangun areal pertanian. Sehingga saat itu etnis Tionghoa terkenal dengan perkebunan karet dan gambir yang menjadi komoditas yang sangat laku di Singapura. (Haluan kepri, Selasa. 12/7)

Sementara yang menetap di daerah yang dekat dengan perairan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan untuk menjadi nelayan."Jadi kondisi alam yang ada dapat disesuaikan dengan peluang yang ada, sehingga dimanapun mereka berada, mereka bisa membaca peluang dan mampu memanfaatkannya dengan baik sehingga mereka mampu untuk bertahan dan eksis.(Haluan kepri,Selasa.12/7)

Dibandingkan dengan kondisi yang sudah modern saat ini, kata Fredy, kemampuan membaca peluang dan memanfaatkannya tetap menjadi modal dan insting yang tetap terjaga di kalangan etnis Tionghoa.Sehingga etnis tionghoa mampu berperan dan sukses dalam berbagai bidang yang mereka tekuni.(Haluan kepri,Selasa.12/7)

"Saat ini kita bisa lihat, etnis tionghoa tidak hanya mampu memegang peranan dalam bidang ekonomi tapi juga bidang-bidang lain. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan adaptasi yang baik dengan lingkungan, serta mampu membaca peluang," kata Fredy.(Haluan kepri,Selasa.12/7)

Bagi warga tionghoa,berusaha dan bekerja keras serta saling membantu antara sesama mereka sangatlah terasa.Tidaklah mengherankan kalau ikatan perdagangan antara mereka untuk saling membantu sampai saat ini masih terjaga, "Modal usaha untuk sukses itu,Sabar,tekun, Kerja keras dan jangan lupa jujur", lambat laun pasti sukses. Kalau usaha macam-macam cuma kuncinya itu saja, Kata asun salah sorang pengusaha di jalan merdeka kepada Haluan kepri,Selasa(12/7).

D. Kesadaran kolektif yang menciptakan Hight-Trust oleh Etnis Tionghoa di Kepri

"Tembok imajinasi" yang dibangun pemerintahan orde baru bertujuan mengekang kebebasan etnis Tionghoa, kata Ketua Paguyuban Sosial Marga

Tionghoa Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua."Ada konspirasi besar yang dibuat penguasa orde baru untuk menghilangkan hak-hak etnis Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia," kata Rudy yang juga anggota DPRD Kepulauan Riau. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)

Sebelum memasuki era reformasi 1998, masyarakat etnis Tionghoa, sebagai salah satu kaum minoritas di Indonesia "dikawal" ketat oleh pemerintah. Masyarakat dari kalangan etnis Tionghoa hanya dibenarkan berwiraswasta."Hanya itu satu-satunya pekerjaan yang diberikan pemerintah," ujarnya. Masyarakat etnis Tionghoa tidak boleh masuk dalam tubuh pemerintahan. Mereka harus bertahan hidup dengan cara berdagang ataupun berbisnis."Tak ada pilihan lain selain berwiraswasta," ucap Rudy yang juga kader Partai Perjuangan Indonesia Baru. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)

Kondisi itu mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat etnis Tionghoa. Para orang tua pesimis menyekolahkan anaknya hingga selesai di tingkat SMA ataupun perguruan tinggi. Mereka sudah dapat memastikan pekerjaan yang bisa dilakukan anaknya hanyalah berbisnis, karena itu sejak kecil anak-anak etnis Tionghoa sudah dididik untuk berdagang. Mereka diajar berhitung sejak kecil dan membantu usaha keluarga."Saat orde baru berkuasa di Indonesia, para orang tua etnis Tionghoa sudah mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi pedagang. Itu sebuah pilihan yang pasti yang diberikan oleh pemerintah," katanya. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)

Masyarakat etnis Tionghoa merasa "tembok imajinasi" itu telah memisahkannya dengan etnis lainnya. Skenario pengekangan hak atas etnis Tionghoa juga didorong dengan fitnah yang dilakukan secara terstruktur dan disebarkan oleh sekelompok orang. Kondisi itu semakin membuat masyarakat etnis Tionghoa terpuruk. Di saat itu juga kelompok tertentu memaksa untuk

mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil usaha yang ditekuni masyarakat etnis Tionghoa. "Kami mengibaratkan tinggal di kandang ayam, yang sebagian telurnya diambil oleh secara paksa oleh penguasa," katanya. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)

Era reformasi yang terjadi sekitar sebelas tahun lalu mengubah nasib etnis Tionghoa di Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau. Selama kurun waktu itu etnis Tionghoa berupaya meruntuhkan "tembok imajinasi" yang mengekang kebebasan mereka sebagai warga negara Indonesia yang sah.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Beni mengatakan, meruntuhkan "tembok imajinasi" yang menakutkan etnis Tionghoa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. "Butuh waktu untuk menghilangkan luka lama," kata Beni yang juga dari Partai Perjuangan Indonesia Baru. Interaksi sosial antaretnis dan pembuktian adanya persamaan hak akan menghancurkan "tembok imajinasi" yang telah berjaya menyengsarakan etnis Tionghoa selama sekitar 30 tahun. Sejak bergulirnya reformasi, kata dia, Indonesia mengalami banyak perubahan menuju arah perbaikan. Namun ada beberapa hal yang masih mengusik kebebasan etnis Tionghoa untuk mendapatkan pelayanan yang sama di instansi milik pemerintah seperti pengurusan surat kependudukan yang lebih mahal dan lebih lama dibanding lainnya. "Masyarakat etnis Tionghoa pasti membayar lebih mahal. Sepertinya itu peninggalan orde baru yang masih tersisa," kata Beni yang juga pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Tanjungpinang. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)

Sementara itu, Rudy Chua mengemukakan, era reformasi mengubah cara berpikir masyarakat etnis Tionghoa untuk masa depan putra-putrinya. Mereka tidak lagi mempersiapkan anak-anaknya menjadi pedagang, sebagaimana yang terjadi pada saat reformasi. Reformasi membuka kran kebebasan

masyarakat etnis Tionghoa dan etnis lainnya yang tinggal di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk bekerja di pemerintahan."Beragam pekerjaan saat ini bisa didapatkan masyarakat etnis Tionghoa.Mereka bisa jadi PNS, guru, TNI, Polri dan sebagainya," katanya.Kesempatan itu dipergunakan masyarakat etnis Tionghoa.Sebagian dari mereka mulai meninggalkan pekerjaan sebagai wiraswasta. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)

Dari pernyataan tokoh-tokoh etnis Tionghoa di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat etnis tionghoa seakan ingin membuktikan kepada semua bahwa etnis Tionghoa akan terus bersatu dan bergerak di berbagai sector. Kesadaran Masyarakat Tionghoa di Tanjungpinang yang merasa di diskriminasi sejak era sebelum reformasi membuat mereka memiliki integritas yang tinggi terhadap etnisnya, sehingga trust yang mereka ciptakan sangat tinggi dengan menguasai modal social baik di sector ekonomi, politik, budaya dan pendidikan.Mereka juga beranggapan bahwa era orde baru merupakan tembok imajinasi yang harus di runtuhkan dimasa setelah reformasi ini.

KESIMPULAN

Trust yang dibangun oleh etnis tionghoa sangat kuat di Kepri dimana dengan budaya Konghucu yang kental serta banyaknya organisasi tionghoa di Kota Tanjungpinang dari berbagai misi baik itu dalam bidang perdagangan, budaya dan keagamaan.Masuknya kaum pendatang ke dalam provinsi Kepulauan Riau menyebabkan perubahan komposisi masing-masing etnis dan agama, serta perubahan sistem pendistribusian sumber daya ekonomi dan politik yang merugikan orang Melayu. Hal ini juga dibarengi oleh perubahan komposisi populasi pada tingkat/strata ekonomi-sosial, khususnya bila diukur dari sudut pendidikan dan pekerjaan: kaum pendatang, yaitu etnis Tionghoa dan kelompok agama Protestan,Katolik, dan Budha menempati posisi atas dalam

strata ekonomi-sosial, sedangkan penduduk asli, yaitu etnis Melayu, menempati strata/tingkat ekonomi-sosial terendah.

Perubahan komposisi ini bisa menjadi sinyal dini bahwa kekerasan konflik bisa terjadi di Kepulauan Riau. Secara politis, sentimen orang Melayu akan menjadi masalah terpendam (*problems submerged*). Ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kepulauan Riau dan Republik Indonesia untuk mengurangi atau menghilangkan sisi negatif dari perbedaan etnis dan sebaliknya mengoptimalkan peluang dari munculnya heterogenitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, pembuat kebijakan hendaknya memprioritaskan keharmonisan antar etnis dan kelompok agama dalam provinsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Afif, Afthonul. 2012. *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*. Jawa Barat: KEPIK.
- Fukuyama, Francis. 1995. *TRUST; Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Hefner, Robert. W. 2007. *Politik Multikulturalisme*. Yogyakarta: KANISIUS.
- J. Long, Nicholas. 2013. *Being Malay in Indonesia. Histories, Hopes and Citizenship in the Riau Archipelago*. Singapore: Asian Studies Association of Australia in association with NUS Press and NIAS Press.
- Jusuf, Iskandar. 2012. *Dari Tionghoa Hwe Koan 1900 Sampai Sekolah Terpadu Pahoa 2008*. Jakarta: Sekolah Terpadu Pahoa.
- Lam, N. Mark dan John L. Graham. 2007. *CHINA NOW*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mahfud, Choirul. 2013. *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry Van Klinken. 2014. *Politik Lokal Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ode, La M.D. 2012. *Etnis Cina Indonesia Dalam Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ode, La M.D. 2013. *Politik Tiga Wajah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Oommen, T.K. 2009. *Kewarganegaraan, Kebangsaan dan Etnisitas*;

- Mendamaikan Persaingan Identitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sjaf, Sofyan. 2014. *Politik Etnik; Dinamika Politik Lokal Kendari*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sochmawardiah, Hesti Armiwulan. 2013. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum dan HAM; Study Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*. Yogyakarta: GENTA Publishing.
- Suryadinata, Leo. 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa di Indonesia Tahun 1900-2002*. Jakarta: LP3ES.
- Tan, G. Mely. 2008. *Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wibowo, I. 2007. *Belajar Dari Cina Bagaimana Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Kompas.
- Winarta, Frans H. 2007. *Jalan Panjang Menjadi WNI; Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis*. Jakarta: Kompas.
- Yau, Chang Hoon. 2012. *Identitas Tionghoa Pasca Suharto-Budaya, Politik dan Media*. Jakarta: LP3ES.
- Yu-Lan, Fung. 2007. *Sejarah Filsafat Cina*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal, Tesis dan Skripsi :

- Eriyanti, Fitri. *Dinamika Posisi Identitas Etnis Tionghoa dalam Tinjauan Teori Identitas Sosial DEMOKRASI* Vol. V No. 1 Th. 2006
- Faucher, Carole. 2007. *Menggugat Batas-Batas di Kepulauan Riau*. Jurnal Politik Lokal. Jakarta: YOI.
- Galus, Ben Senang. 2009. *Mempertimbangkan Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural di Indonesia : Studi tentang Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural Pasca Otonomi Daerah*.
- Haboddin, Muhtar dkk. 2013. *Revitalisasi Politik Identitas di Indonesia*. Pusat Studi Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
- Handoko, Tri Yudha. 2009. *Politik Identitas Etnis Cina di Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Hefner, Robert.W. 2007. *Multikulturalisme dan kewarganegaraan di Malaysia, Singapura dan Indonesia*. Kanisius.
- Hermawan, Dedy. *Trust Dan Network Governance Yang Transparan Dan Akuntabel* Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2,

No.5, Juli-Desember 2008.

Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Volume 3 No.1 Februari 2012.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Karim, Zamzami A.Jurnal Perbatasan Universitas Maritim Raja Ali Haji Vol.5.MENCARI IDENTITAS DARI ROMANTISME SEJARAH:PENYANGGA BUDAYA KOMUNITAS PERBATASAN.

Mely G. Tan. 2008. Chinese Dietary Culture In Indonesian Urban Society. YOI

Mely G. Tan. 2008. The Social and Cultural Dimensions of The Role of Ethnic Chinese In Indonesian. YOI

Pratama,Rian Anggria. 2013. Budaya Politik Etnis Tinghoa di Tanjungpinang Kepulauan Riau.Skripsi Universitas Maritim raja Ali Haji Tanjungpinang.

Putra, Eka Vidia. 2009. Elit dan Politik Identitas. Salatiga:Persemaian Cinta Kemanusiaan(PERCIK).

Setyanto, Widya.P dan Halomoan Pulungan. 2009. Politik Identitas;Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik di Indonesia dan Asia Tenggara.Salatiga:Persemaian Cinta Kemanusiaan(PERCIK).

Wah, Francis Loh Kok. 2007. Kemana Perginya Politik Etnis ?Kasus-kasus partai politik dan politisi non-melayu.Kanisius.

Wahyudin, Baso. 2011. KOMUNIKASI ETNIS TIONGHOA DAN ETNIS BUGIS DI SENGKANG KABUPATEN WAJO (STUDI KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA). Skripsi FISIPOL UNHAS.

Sumber-Sumber Lain :

www.haluankepri.com

www.tanjungpinangpos.com

www.kompas.com

www.Meida-Antar.KepulauanRiau.com

www.JakartaPos.com

www.Disduk-Kepri.co.id

<http://disparekraf.tanjungpinangkota.go.id>